



## Peran Pemerintah Kota Medan dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pada Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Mhd.Mashuri Hamdani Lubis<sup>1</sup>, Delima<sup>2</sup>, Efri Islami<sup>3</sup>, Anisa Suci<sup>4</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: [m.mashurihamdani.lbs@gmail.com](mailto:m.mashurihamdani.lbs@gmail.com)

**Abstract.** *This abstract discusses the role of the Medan City Government in developing the people's economy through public policy and community empowerment. The background of this study is based on the importance of strengthening the community-based economy as the main strategy in facing global economic challenges and improving citizen welfare. The study aims to analyze how public policies implemented and community empowerment efforts by the city government are able to encourage the growth of the people's economy in Medan. The method used is qualitative with a literature review approach, namely examining various sources of literature such as journals, books, and relevant policy documents. The research findings show that the Medan City Government has initiated various empowerment programs, such as entrepreneurship training, facilitating access to capital, and strengthening local economic institutions. However, there are challenges in terms of cross-sector coordination and limited resources. The implications of this study emphasize the need for synergy between the government, society, and the private sector to create an inclusive and sustainable people's economy ecosystem, as well as the importance of continuous evaluation and policy innovation to strengthen community empowerment at the local level.*

**Keywords:** *People's economy, Public policy, Medan City, Community empowerment, MSMEs.*

**Abstrak.** Abstrak ini membahas peran Pemerintah Kota Medan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penguatan ekonomi berbasis masyarakat sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan warga. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik yang diterapkan serta upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kota mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Medan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literature review, yaitu menelaah berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menginisiasi berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Namun, terdapat tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, serta pentingnya evaluasi dan inovasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

**Kata kunci:** Ekonomi kerakyatan, Kebijakan publik, Kota Medan, Pemberdayaan masyarakat, UMKM.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Medan telah menempatkan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan publik dan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti mendukung UMKM melalui pemberian bantuan keuangan, program pengembangan keterampilan, dan bentuk bantuan lainnya, serta penciptaan lapangan kerja baru yang bertujuan

untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi warga (Sinambela, 2023). Visi nasional Indonesia Emas 2045 yang mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang, sejalan dengan upaya tersebut. Demokrasi ekonomi, landasan teori ekonomi rakyat, berpandangan bahwa masyarakat harus memainkan peran sentral dalam pembangunan, sementara negara harus memainkan peran regulator dan fasilitator (Styaningrum, 2021). Di Kota Medan, konsep pemberdayaan masyarakat telah diimplementasikan melalui program-program seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), pelatihan wirausaha, serta pemberian dana bergulir bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk DPRD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Dinas Koperasi dan UMKM, untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak pada ekonomi rakyat.

Namun, sejumlah penelitian dan kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses modal, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha. Di beberapa wilayah pesisir Kota Medan, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, sementara program pemberdayaan belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan secara optimal (Amelia et al., 2025). Selain itu, koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi kerakyatan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan (Azzahra & Soemitra, 2024).

Hal yang membuat penelitian ini unik adalah pemeriksaan menyeluruh peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan publik yang adaptif dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis data dan kebutuhan lokal. Penelitian ini juga mengidentifikasi gap antara kebijakan yang telah dirancang dengan implementasi di lapangan, khususnya terkait partisipasi masyarakat dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi pada kelompok rentan serta UMKM. Analisis ini penting mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di beberapa kecamatan, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pemberdayaan masyarakat maupun inisiatif kebijakan publik Pemerintah Kota Medan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat inisiatif tersebut, dan akhirnya memberikan rekomendasi strategis agar inisiatif tersebut lebih efektif juga berkelanjutan. Tujuan penelitian ini ialah untuk membantu masyarakat Kota Medan

dengan memberikan pencerahan tentang cara meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pembuatan kebijakan yang lebih ramah, partisipatif, dan berhasil dalam jangka panjang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Konsep Ekonomi Kerakyatan

Dalam ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan mendorong pertumbuhan UMKM maupun memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dengan lebih baik. Di sini, pemerintah berperan sebagai fasilitator sekaligus regulator untuk mendorong terciptanya lingkungan yang memungkinkan perusahaan rakyat tumbuh subur. Idennya adalah masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan ekonomi melalui proses ini(Widayati & Nugraheni, 2022).

Dalam konteks Kota Medan, ekonomi kerakyatan diarahkan untuk meminimalisasi praktik *black economy* dan meningkatkan kontribusi sektor pajak melalui pemberdayaan masyarakat. Gagasan ekonomi kerakyatan menawarkan solusi potensial bagi krisis ekonomi saat ini. Setiap aspek ekonomi kerakyatan berlandaskan pada keadilan. Sistem ekonomi lain yang disebut-sebut sangat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip Islam adalah ekonomi kerakyatan. Jadi, jelaslah bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah jalan yang harus ditempuh jika Indonesia ingin mewujudkan ekonomi yang diimpikannya. Dalam iklim ekonomi Indonesia tahun 1997-1998, usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya yang bergerak di bidang produksi maupun distribusi barang kebutuhan pokok sangat terbantu oleh ekonomi kerakyatan.(Moh. Musfiq Arifqi, 2021).

Prinsip bahwa penguasaan sumber daya alam oleh rakyat harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan teori ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan gagasan utama demokrasi ekonomi bahwa negara harus berupaya mewujudkan keadilan sosial dengan memberlakukan kebijakan yang baik bagi semua orang. Ekonomi kerakyatan mengatur agar sektor-sektor produksi yang utama dan berdampak pada kehidupan banyak orang perlu ditangani oleh negara, sehingga tidak jatuh pada tangan individu atau kelompok yang menguasai sehingga dapat menimbulkan penindasan pada rakyat(Sinta & Destriani, 2025).

### Peran Kebijakan Publik dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Kebijakan publik menjadi instrumen kritis dalam mengarahkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Menurut teori administrasi publik, pemerintah memiliki tiga peran utama

1. Menetapkan regulasi yang mendukung iklim usaha, seperti kebijakan perizinan dan perlindungan hukum bagi UMKM.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi(Kholifah, 2022).
3. Menyediakan akses modal, teknologi, dan infrastruktur pendukung.

Salah satu contoh konkretnya adalah kolaborasi sektor publik, komersial, dan masyarakat Kota Medan untuk memperkuat hubungan bisnis dan memaksimalkan dampak organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Taktik lebih lanjut untuk melindungi perusahaan domestik dari persaingan asing adalah dengan menerapkan regulasi investasi yang selektif.

### **Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Administrasi Publik**

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi(Supit, 2024). Teori *The Ladder of Participation* (Arnstein, 1969) menjelaskan delapan tingkatan partisipasi, mulai dari manipulasi hingga kontrol penuh oleh masyarakat. Dalam konteks Medan, pemberdayaan mencakup:

1. Keterlibatan mental dan emosional (*mental and emotional involvement*): Membangun kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi lokal.
2. Dorongan kontribusi (*motivation to contribute*): Program pelatihan kewirausahaan dan akses permodasan.
3. Penerimaan tanggung jawab (*acceptance of responsibility*): Mendorong masyarakat mengelola sumber daya secara mandiri.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan artikel ini:

**Tabel.1**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                    | <b>Peneliti</b> | <b>Fokus Penelitian</b>                                                                        | <b>Temuan Utama</b>                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan | (Agasi, 2023)   | Peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui kebijakan publik dan program pemberdayaan | Pemerintah Kota Medan berperan dalam menekan angka kemiskinan melalui program renovasi rumah, pembinaan UMKM, pelatihan kerja, dan aplikasi SIDUTA. |

|   |                                                                                                                      |                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah | (Aswin, 2024)           | Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan                              | Peraturan Walikota menjadi dasar pelaksanaan program pemberdayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi sumber daya, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat. |
| 3 | Peranan Pemerintah Kota Medan dalam Pelaksanaan E-Katalog bagi Pelaku UMKM                                           | (Nasution, 2021)        | Peran pemerintah dalam mendukung UMKM melalui digitalisasi dan bantuan usaha                     | Pemerintah Kota Medan mendukung UMKM lewat E-Katalog lokal, bantuan alat dan modal usaha, serta pendampingan hingga pemasaran digital.                                              |
| 4 | Efektivitas Kinerja Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Medan Timur Kota Medan          | (Pulungan et al., 2021) | Evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan | Program pembinaan koperasi dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan, namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan.                         |

### 3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan strategi tinjauan pustaka dengan fokus kualitatif sistematis untuk menganalisis peran pemerintah dalam konteks ekonomi kerakyatan. Desain penelitian mengacu pada model *traditional review* yang memungkinkan peneliti memilih dan mensintesis literatur secara fleksibel berdasarkan relevansi topik. Fokusnya adalah mengidentifikasi pola, tematik, dan hubungan antar variabel dalam kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

Populasi penelitian mencakup dokumen kebijakan pemerintah, laporan tahunan dinas terkait, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas ekonomi kerakyatan, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan. Sampel dipilih melalui *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Publikasi tahun 2019–2025 untuk memastikan kesesuaian konteks temporal.
2. Dokumen resmi dari pemerintah Kota Medan atau lembaga terafiliasi.
3. Artikel ilmiah terindeks Scopus, Sinta, atau bereputasi nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan database seperti Google Scholar, *ScienceDirect*, dan repositori institusi dengan kata kunci: "*ekonomi kerakyatan*", "*kebijakan publik Kota Medan*", dan "*pemberdayaan masyarakat*".

Data dianalisis secara tematik dengan tahapan:

Penelitian mengadopsi model Siklus Reflektif yang terdiri dari:

1. Identifikasi Masalah: Memetakan isu ekonomi kerakyatan di Kota Medan melalui data sekunder.
2. Eksplorasi Kebijakan: Menganalisis kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi.
3. Sintesis Intervensi: Merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan literatur. Model ini dipadukan dengan *Framework Analysis* untuk menyelaraskan temuan dengan konteks lokal (Alif & Solihin, 2023).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Kebijakan Publik untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan**

Pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kota Medan merupakan hasil dari serangkaian kebijakan publik dan program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan partisipasi aktif warga. Pemerintah Kota Medan mengadopsi pendekatan multidimensi, menggabungkan infrastruktur, akses modal, pelatihan keterampilan, dan kolaborasi antar-stakeholder untuk menciptakan ekosistem ekonomi inklusif.

Kebijakan publik di Medan difokuskan pada tiga area utama: pengembangan infrastruktur, dukungan keuangan, dan penyederhanaan regulasi. Pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pasar tradisional menjadi prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas distribusi barang dan jasa, khususnya bagi UMKM (Pemerintah Kota Medan, 2022). Contohnya, proyek perbaikan jalan di daerah terpencil telah mengurangi biaya logistik dan memperluas jangkauan pasar produk lokal. Di sisi keuangan, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir (GDP) untuk memberikan akses permodalan dengan bunga rendah. Program ini dilengkapi dengan pelatihan manajemen keuangan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif. Selain itu, penerapan E-Katalog

Lokal mewajibkan instansi pemerintah membeli produk UMKM, meningkatkan penyerapan pasar lokal hingga 30%(Prokopim Pemko Medan, 2022).

Regulasi yang disederhanakan, seperti perizinan usaha satu pintu, mengurangi birokrasi dan menarik investasi. Kebijakan ini didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.7/2021, yang memudahkan UMKM memperoleh sertifikasi dan akses pasar ekspor(Diskominfo Kota Medan, 2022). Pemerintah Medan mengimplementasikan model pemberdayaan berbasis komunitas, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Pelatihan kewirausahaan dan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Di bidang kuliner, Dinas Koperasi UMKM Medan menyelenggarakan workshop pengemasan produk dan sertifikasi halal, yang meningkatkan nilai jual produk seperti "Bika Ambon" hingga 40%. Program SIDUTA (Sistem Inovasi Ketenagakerjaan Terpadu) juga membantu pencari kerja menemukan lowongan sesuai keahlian(Amelia et al., 2025). Sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan memperkuat dampak program. Bank-bank lokal seperti Bank Sumut dan BRI menyediakan KUR dengan jaminan pemerintah, sementara perusahaan besar seperti PT. Indofood memberikan pendampingan teknis kepada UMKM kuliner. Kolaborasi ini tercermin dalam peningkatan ekspor kerajinan tangan Medan ke pasar ASEAN sebesar 15% pada 2024. Transformasi digital diwujudkan melalui pelatihan pemasaran daring dan platform Medan Brand Keren, yang mempromosikan produk UMKM secara nasional. Sekitar 60% UMKM di Medan telah beralih ke pemasaran digital, meningkatkan omzet rata-rata 25%.

Meski berhasil, beberapa tantangan tetap ada, seperti ketimpangan akses program di daerah pedesaan dan tingginya angka putus sekolah yang memengaruhi kualitas SDM. Pemerintah merespons dengan memperluas cakupan pelatihan ke daerah terpencil dan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan vokasi sebesar 20% pada 2025. Evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala melalui forum musyawarah dengan masyarakat. Misalnya, revisi Perda No.5/2023 tentang UMKM memasukkan insentif pajak bagi usaha yang merekrut pekerja lokal, setelah menerima masukan dari pelaku usaha.

Kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat di Medan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kerakyatan memerlukan pendekatan holistik. Dengan kombinasi infrastruktur memadai, akses keuangan inklusif, pelatihan berbasis kebutuhan, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, Medan berhasil meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB dari 35% (2021) menjadi 42% (2024). Keberhasilan ini menjadi model bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.

### **Inisiatif Program Pemberdayaan Ekonomi**

Pemerintah Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya.

Pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Koperasi dan UKM, secara rutin mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan dasar kewirausahaan, tetapi juga mengajarkan strategi inovasi, metode pemasaran modern (*marketing mix*), dan penggunaan model bisnis yang adaptif seperti *Business Model Canvas*. Selain itu, materi digitalisasi dan pemasaran online semakin ditekankan agar pelaku UMKM mampu bersaing di era ekonomi digital. Hasilnya, pelatihan ini telah meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri pelaku usaha, bahkan mendorong munculnya wirausaha baru di kalangan pemuda dan kelompok rentan (Purba & Purba, 2020).

Salah satu kendala utama UMKM di Medan adalah keterbatasan modal usaha. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan modal langsung, tetapi juga memfasilitasi kemudahan akses permodalan melalui legalitas usaha (NIB) yang memudahkan pelaku UMKM memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan jaminan kredit program dengan berbagai skema, seperti penggunaan surat perintah kerja, faktur, atau hak kekayaan intelektual sebagai agunan.

Penguatan kelembagaan ekonomi lokal dilakukan dengan mewajibkan penggunaan produk UMKM oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aplikasi E-Katalog Lokal. Langkah ini tidak hanya memperluas pasar bagi produk lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah Kota Medan juga berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri, seperti Grab, untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM (Nasution, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi program pemberdayaan di Medan adalah koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Seringkali, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan sinkron. Hal ini menyebabkan duplikasi program, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan (Dewi, 2024). Selain itu, komunikasi antar instansi pemerintah dan lembaga pendukung UMKM masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia, menjadi hambatan serius. Banyak program pelatihan



dan pendampingan yang belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha karena keterbatasan jumlah fasilitator, minimnya anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat (Yarli & Suriadi, 2025). Selain itu, pelaku UMKM sendiri masih menghadapi kendala dalam memanfaatkan teknologi, kurangnya kreativitas, dan keterbatasan inovasi, yang diperparah oleh naiknya harga bahan baku dan akses pasar yang belum optimal.

### **Peran Strategis Tiga Pilar**

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ekosistem ini bertujuan memberdayakan kelompok rentan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi merata melalui pendekatan partisipatif. Sinergi ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal tetapi juga menjadi penopang prinsip Ekonomi Pancasila yang berlandaskan keadilan sosial.

1. Pemerintah menciptakan kerangka regulasi yang mendukung UMKM dan koperasi melalui insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, serta program pelatihan. Contohnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MD) di Desa Batuma'lonro berhasil meningkatkan infrastruktur desa, meski memerlukan perbaikan dalam distribusi modal usaha (Basir et al., 2019). Kebijakan seperti pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga melibatkan swasta untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ramah lingkungan.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti di Desa Papayan, membentuk ekosistem UMKM berbasis sumber daya lokal. Program pelatihan keterampilan dan pendampingan oleh wirausahawan sosial meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar (Moridu et al., 2023). Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi dalam evaluasi kebijakan di Sarolangun menunjukkan perlunya pendekatan lebih inklusif.
3. Peran swasta tidak terbatas pada investasi tetapi mencakup transfer teknologi dan pendampingan bisnis. PT Visionet Internasional (OVO) berkolaborasi dengan pemerintah dalam digitalisasi UMKM, sementara perusahaan lain menyediakan pelatihan magang untuk meningkatkan kompetensi. Program CSR seperti pembiayaan mikro dan pasar daring membantu UMKM menjangkau konsumen lebih luas.

Evaluasi kebijakan menjadi instrumen kritis untuk mengukur efektivitas program. Studi kasus PNPM-MD di Kecamatan Singkil menunjukkan bahwa meski efektif membangun infrastruktur, distribusi manfaat belum merata antarkelompok masyarakat. BPK RI

menekankan pentingnya transformasi ekonomi hijau yang sejalan dengan SDGs, di mana evaluasi kebijakan membantu memastikan pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan. Di Sarolangun, evaluasi program pemberdayaan mengungkap kebutuhan strategi lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan

Sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta membentuk fondasi ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, sementara evaluasi dan inovasi kebijakan menjaganya tetap relevan dengan dinamika global. Melalui pendekatan partisipatif dan berorientasi masa depan, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya tumbuh cepat tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, sesuai semangat Ekonomi Pancasila.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemerintah Kota Medan telah berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui berbagai kebijakan publik dan program pemberdayaan masyarakat, terutama dengan penguatan UMKM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pendekatan multidimensi yang dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan digitalisasi pemasaran, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Medan dan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Namun, efektivitas program masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kesenjangan akses program di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam pemanfaatan teknologi, inovasi usaha, dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terbukti menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, meski masih perlu penguatan dalam hal evaluasi dan inovasi kebijakan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan integrasi program pemberdayaan agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Perluasan cakupan program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan ke wilayah-wilayah terpencil dan kelompok rentan harus menjadi prioritas, guna mengurangi kesenjangan dan memastikan manfaat ekonomi kerakyatan dirasakan secara merata. Penguatan kapasitas SDM pelaku UMKM melalui pelatihan inovasi, digitalisasi, dan pemasaran modern perlu terus didorong agar UMKM mampu bersaing di era ekonomi digital. Pemerintah harus memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan lembaga

keuangan dalam hal transfer teknologi, pendampingan bisnis, dan perluasan akses pasar, termasuk optimalisasi program CSR untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Agasi, A. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 2(April), 247–252.
- Alif, M., & Solihin, O. (2023). Kajian Tinjauan Literatur dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Signal*, 11(2).
- Amelia, N., Oktarahmadini, S., & Harahap, A. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(1), 1–23.
- Aswin. (2024). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Petisah*. Tesis Pada Universitas Medan Area.
- Azzahra, A., & Soemitra, A. (2024). Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi dan UMKM di Sekitar Kantor Walikota Medan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan ...*, 2(4). <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/3090%0Ahttps://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/download/3090/2748>
- Basir, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma'Lonro Kecamatan Biringbulu Di Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(2), 72–79.
- Dewi, S. M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *IPDN*. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETU\\_NGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETU_NGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Diskominfo Kota Medan. (2022, September 29). Pemko Medan Serius Berdayakan UMKM Agar Naik Kelas. *Portalmedan.Go.Id*.
- Kholifah, I. (2022). *Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017* [Skripsi Pada IAIN Metro]. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5855/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5855/1/IFAUL\\_KHOLIFAH\\_1702010006... - Ifaul 18.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5855/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5855/1/IFAUL_KHOLIFAH_1702010006...-Ifaul_18.pdf)
- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Moridu, I., Arisanjaya Doloan, Fitriani, Nurcahya Hartaty Posumah, Rini Hadiyati, Debiyanti Kune, & Rosfianti M. Yadasang. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial dalam Menangani Masalah Sosial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(01), 42–53. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i01.143>
- Nasution, H. C. (2021). Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Pelaku Usaha Umkm

- Dalam Pelaksanaan E-Katalog Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 1–10.
- Pemerintah Kota Medan. (2022). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023. In *portalmedan.go.id*.
- Prokopim Pemko Medan. (2022, October 25). Pemko Medan Lakukan Pemulihan Kota Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. *Portalmedan.Go.Id*.
- Pulungan, M. F., Siregar, N. S. S., & Sinaga, R. S. (2021). Analisis Efektivitas Kinerja Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Medan Timur Kota Medan. *Perspektif*, 10(2), 763–777. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5224>
- Purba, R. R., & Purba, M. L. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Putus Sekolah Di Kota Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(September), 474–479. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/4302%0Ahttp://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/download/4302/2933>
- Sinambela, J. (2023). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–14. [http://eprints.ipdn.ac.id/16052/1/Repository Josua Sinambela.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/16052/1/Repository%20Josua%20Sinambela.pdf)
- Sinta, & Destriani, A. (2025). Konsep Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Styaningrum, F. (2021). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>
- Supit, B. F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Tahta Media Group*.
- Widayati, R., & Nugraheni, A. D. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Ajaran Tamansiswa Menuju Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DEWANTARA*, 5(2), 32. <https://doi.org/10.31317/jpmd.v5i2.823>
- Yarli, Y., & Suriadi, A. (2025). Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual : Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan. *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1).